

**KEPALA DESA PULOSARI
KECAMATAN BARENG KABUPATEN JOMBANG**

**PERATURAN KEPALA DESA PULOSARI
NOMOR 7 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN KELUARGA MISKIN PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI
(BLT) DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PULOSARI**

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propensi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2989);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang, Tahun 2016 Nomor 1/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 8/D);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 12/D);

22. Peraturan Bupati Jombang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 2/E);
23. Peraturan Bupati Jombang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 8/E);
24. Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok di Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 10/E);
25. Peraturan Bupati Jombang Nomor 84 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 84/E);
26. Peraturan Bupati Jombang Nomor 68 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024 Nomor 68);
27. Peraturan Desa Pulosari Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Pulosari Tahun 2023 Nomor 4/E);
28. Peraturan Desa Pulosari Nomor 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Desa (Lembaran Desa Pulosari Tahun 2017 Nomor 2/D);
29. Peraturan Desa Pulosari Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Pulosari Tahun 2019 Nomor 6/E);
30. Peraturan Desa Pulosari Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Pulosari Tahun 2024 Nomor 4/E);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA PULOSARI TENTANG PENETAPAN KELUARGA MISKIN PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

1. Penganggaran alokasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dianggarkan melalui Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak, dan Keadaan Darurat sub Bidang Keadaan Darurat;

2. Alokasi penganggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu sebesar 300.000 (enam ratus ribu rupiah) selama 12 (tiga) bulan kepada penerima manfaat BLT-Dana Desa;
3. Penerima manfaat BLT-Dana Desa ditetapkan paling sedikit dengan kriteria antara lain sebagai berikut :
 - a. Keluarga Miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan dan;
 - b. Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosia Tunai dan Program Bantuan Sosial Pemerintah Lainnya.
 - c. Keluarga miskin sebagaimana dimaksud huruf a wajib berdomisili di desa Pulosari dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan;

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Dalam pelaksanaan anggaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa adalah Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4


Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Pulosari

Ditetapkan di : Pulosari

Pada tanggal : 29 September 2024

KEPALA DESA,

NEELUFUS SOLIKAH



Diundangkan di : Pulosari

Pada tanggal 29 September 2024

SEKRETARIS DESA



W I D J I

BERITA DESA PULOSARI TAHUN 2024 NOMOR 7/E

**DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT
DESA PULOSARI KECAMATAN BARENG KABUPATEN JOMBANG**

BNBA BLT-DD	TAHUN 2025		
Pagu DD		1.257.260.000,00	
15 % Maksimal Untuk BLT DD		188.589.000,00	
KPM yang di tetapkan dalam Musdes = 47		169.200.000,00	13,46 %

NO	PROVINSI	KABUPATEN	KECAMATAN	ID DESA	DESA	TAHUN	NIK	NAMA PENERIMA	JENIS KELAMIN 1 = LAKI-LAKI 2 = PEREMPUAN	TANGGAL LAHIR Format : HH/BB/TTTT	ALAMAT	RT	RW	TERMASUK PEKKA 1 = petani pemilik lahan 2 = petani penggarap/penyewa 3 = buruh tani 4 = nelayan pemilik perahu 5 = nelayan penyewa perahu 6 = buruh nelayan 7 = buruh pabrik 8 = guru sekolah umum 9 = guru agama 10 = pedagang barang 11 = pedagang makanan	KRITERIA BLT 1 = Masuk DTKS belum dapat JPS (Tidak termasuk penerima PKH, Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bansos Tunai, dan Program Bansos Pemerintah Lainnya) 2 = Belum terdata DTKS 3 = Kehilangan mata pencaharian 4 = Punya penyakit kronis/menahun 5 = Keluarga Miskin/tidak mampu yang berdomisili di Desa	MEKANISME PENYALURAN/PEMBAYARAN 1 = Tunai 2 = Transfer (Cashless)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	16
1	JAWA TIMUR	JOMBANG	BARENG	35.17.04.2013	PULOSARI	2025	3517044107600110	WATI'AH	2	01/07/1960	DSN PULONASIR RT.02 RW.06	2	6	99	1	1
2	JAWA TIMUR	JOMBANG	BARENG	35.17.04.2013	PULOSARI	2025	3517040107420032	AMARI	1	01/07/1942	DSN PULONASIR RT 02 RW 06	2	6	99	2	1
3	JAWA TIMUR	JOMBANG	BARENG	35.17.04.2013	PULOSARI	2025	3517044107380108	SUKIATUN	2	01/07/1938	DSN PULONASIR RT 03 RW 07	3	7	99	2	1
4	JAWA TIMUR	JOMBANG	BARENG	35.17.04.2013	PULOSARI	2025	3517041102830002	JAPAR	1	11/02/1983	DSN PULONASIR RT.03 RW.07	3	7	99	2	1
5	JAWA TIMUR	JOMBANG	BARENG	35.17.04.2013	PULOSARI	2025	3517041010450003	SUKARDI	1	10/10/1945	DSN PULONASIR RT 04 RW 07	4	7	99	2	1
6	JAWA TIMUR	JOMBANG	BARENG	35.17.04.2013	PULOSARI	2025	3517044107530051	NGATEMI	2	01/07/1953	DSN PULONASIR RT.04 RW.07	4	7	99	1	1
7	JAWA TIMUR	JOMBANG	BARENG	35.17.04.2013	PULOSARI	2025	3517044107630123	TUKINAH	2	01/07/1963	DSN PULONASIR RT 06 RW 08	6	8	99	1	1
8	JAWA TIMUR	JOMBANG	BARENG	35.17.04.2013	PULOSARI	2025	3517045001350003	SENENTI	2	10/01/1935	DSN PULONASIR RT 06 RW 08	6	8	99	1	1
9	JAWA TIMUR	JOMBANG	BARENG	35.17.04.2013	PULOSARI	2025	3517046007620002	SAMIYEM	2	20/07/1962	DSN PULONASIR RT 06 RW 08	6	8	3	1	1
10	JAWA TIMUR	JOMBANG	BARENG	35.17.04.2013	PULOSARI	2025	3517044903620002	JULIKAH	2	03/09/1962	DSN PULONASIR RT 07 RW 08	7	8	99	1	1
11	JAWA TIMUR	JOMBANG	BARENG	35.17.04.2013	PULOSARI	2025	3517044107670009	TUKAH	2	07/01/1967	DSN PULONASIR RT 07 RW 08	7	8	3	2	1
12	JAWA TIMUR	JOMBANG	BARENG	35.17.04.2013	PULOSARI	2025	3517047011700008	SULIH	2	30/11/1970	DSN PULONASIR RT 08 RW 08	8	8	3	2	1
13	JAWA TIMUR	JOMBANG	BARENG	35.17.04.2013	PULOSARI	2025	3508173008720003	HARIONO	1	30/08/1972	DSN PULONASIR RT 08 RW 08	8	8	99	2	1
14	JAWA TIMUR	JOMBANG	BARENG	35.17.04.2013	PULOSARI	2025	3517045212660001	FATEKAH	2	01/07/1945	DSN PULOSARI RT 01 RW 03	1	3	99	2	1
15	JAWA TIMUR	JOMBANG	BARENG	35.17.04.2013	PULOSARI	2025	3517046003350002	FATIMAH	2	20/03/1935	DSN PULOSARI RT 05 RW 04	2	3	99	1	1
16	JAWA TIMUR	JOMBANG	BARENG	35.17.04.2013	PULOSARI	2025	3517040107460042	KADAR	1	01/07/1946	DSN PULOSARI RT 02 RW 03	2	3	99	2	1
17	JAWA TIMUR	JOMBANG	BARENG	35.17.04.2013	PULOSARI	2025	3517044107450012	EMI	2	01/07/1945	DSN PULOSARI RT 04 RW 04	4	4	99	2	1
18	JAWA TIMUR	JOMBANG	BARENG	35.17.04.2013	PULOSARI	2025	3517045509550001	ISYENINGSIH	2	15/05/1955	DSN PULOSARI RT 04 RW 04	4	4	99	1	1
19	JAWA TIMUR	JOMBANG	BARENG	35.17.04.2013	PULOSARI	2025	3517044107520043	LASPIAH	2	01/07/1952	DSN PULOSARI RT 05 RW 04	5	4	99	2	1
20	JAWA TIMUR	JOMBANG	BARENG	35.17.04.2013	PULOSARI	2025	3517044107530080	SUNANIK	2	01/07/1953	DSN PULOSARI RT 06 RW 04	6	4	99	1	1
21	JAWA TIMUR	JOMBANG	BARENG	35.17.04.2013	PULOSARI	2025	3517047011360004	RUKAYATIN	2	30/11/1936	DSN PULOSARI RT.07 RW.05	7	5	99	1	1
22	JAWA TIMUR	JOMBANG	BARENG	35.17.04.2013	PULOSARI	2025	3517040107400007	PUJIONO	1	01/07/1940	DSN PULOSARI RT 07 RW 05	7	5	3	1	1
23	JAWA TIMUR	JOMBANG	BARENG	35.17.04.2013	PULOSARI	2025	3517041101600001	SOLIKAN	1	11/01/1960	DSN PULOSARI RT 08 RW 05	8	5	99	1	1
24	JAWA TIMUR	JOMBANG	BARENG	35.17.04.2013	PULOSARI	2025	3517044107590064	TUNAH	2	01/07/1959	DSN PULOSARI RT 08 RW 05	8	5	3	1	1
25	JAWA TIMUR	JOMBANG	BARENG	35.17.04.2013	PULOSARI	2025	3517054812870001	DEVI ARDIANTI	2	12/08/1987	DSN PULOSARI RT.03 RW.03	8	5	99	2	1
26	JAWA TIMUR	JOMBANG	BARENG	35.17.04.2013	PULOSARI	2025	3517044910450002	NGATIMAH	2	09/10/1945	DSN PULOSARI RT.08 RW.05	8	5	99	1	1
27	JAWA TIMUR	JOMBANG	BARENG	35.17.04.2013	PULOSARI	2025	3517044505590003	SUNDARI	2	05/05/1959	DSN PULOSARI RT.09 RW.05	9	5	99	1	1
28	JAWA TIMUR	JOMBANG	BARENG	35.17.04.2013	PULOSARI	2025	3517044107470066	MISIAM	2	01/07/1947	DSN PULOSARI RT.09 RW.05	9	5	99	1	1
29	JAWA TIMUR	JOMBANG	BARENG	35.17.04.2013	PULOSARI	2025	3517047011470006	SARIYEM	2	30/11/1947	DSN PULOSARI RT 09 RW 05	9	5	99	2	1

30	JAWA TIMUR	JOMBANG	BARENG	35.17.04.2013	PULOSARI	2025	3517041908570001	JULI	1	19/08/1957	DSN SUMBERMULYO RT 01 RW 01	1	1	3	1	1
31	JAWA TIMUR	JOMBANG	BARENG	35.17.04.2013	PULOSARI	2025	3517040406770004	SUBADIYO	1	04/06/1977	DSN SUMBERMULYO RT.01 RW.01	1	1	3	2	1
32	JAWA TIMUR	JOMBANG	BARENG	35.17.04.2013	PULOSARI	2025	3517043011500010	SUKEM	1	30/11/1950	DSN SUMBERMULYO RT 02 RW 01	2	1	3	1	1
33	JAWA TIMUR	JOMBANG	BARENG	35.17.04.2013	PULOSARI	2025	3517044107450035	ASEMAH	2	01/07/1945	DSN SUMBERMULYO RT.02 RW.01	2	1	3	1	1
34	JAWA TIMUR	JOMBANG	BARENG	35.17.04.2013	PULOSARI	2025	3517044107450073	MISNING	2	01/07/1945	DSN SUMBERMULYO RT 04 RW 02	4	2	99	1	1
35	JAWA TIMUR	JOMBANG	BARENG	35.17.04.2013	PULOSARI	2025	3517044107460034	SUPIYAH	2	01/07/1946	DSN SUMBERMULYO RT 04 RW 02	4	2	99	1	1
36	JAWA TIMUR	JOMBANG	BARENG	35.17.04.2013	PULOSARI	2025	3517044107450035	RUKILAH	2	01/07/1961	DSN SUMBERMULYO RT.04 RW.02	4	2	3	1	1
37	JAWA TIMUR	JOMBANG	BARENG	35.17.04.2013	PULOSARI	2025	3517044107400049	MARTINI	2	01/07/1940	DSN SUMBERMULYO RT 05 RW 02	5	2	99	1	1
38	JAWA TIMUR	JOMBANG	BARENG	35.17.04.2013	PULOSARI	2025	3517044107630085	NGATMINI	2	01/07/1963	DSN SUMBERMULYO RT 06 RW 02	6	2	99	2	1
39	JAWA TIMUR	JOMBANG	BARENG	35.17.04.2013	PULOSARI	2025	3517044107330169	SRIASIH	2	01/07/1933	DSN SUMBERMULYO RT 06 RW 02	6	2	99	1	1
40	JAWA TIMUR	JOMBANG	BARENG	35.17.04.2013	PULOSARI	2025	3517044107520006	PIATI	2	01/07/1952	DSN SUMBERMULYO RT 06 RW 02	6	2	99	2	1
41	JAWA TIMUR	JOMBANG	BARENG	35.17.04.2013	PULOSARI	2025	3517044107370051	MAH	2	24/11/1969	DSN SUMBERMULYO RT.06 RW.02	6	2	99	1	1
42	JAWA TIMUR	JOMBANG	BARENG	35.17.04.2013	PULOSARI	2025	3517042411690001	TOHARI	1	12/07/1978	DSN PULONASIR RT.01 RW.06	1	6	99	2	1
43	JAWA TIMUR	JOMBANG	BARENG	35.17.04.2013	PULOSARI	2025	3517055207780006	TINEM	2	03/07/1937	DSN PULONASIR RT.08 RW.08	8	8	99	2	1
44	JAWA TIMUR	JOMBANG	BARENG	35.17.04.2013	PULOSARI	2025	3517040107510039	SUKEMI	1	07/01/1951	DSN PULONASIR RT.02 RW.06	2	6	99	2	1
45	JAWA TIMUR	JOMBANG	BARENG	35.17.04.2013	PULOSARI	2025	3517041006540001	MAHMUDI	1	06/10/1954	DSN SUMBERMULYO RT.01 RW.01	1	1	99	2	1
46	JAWA TIMUR	JOMBANG	BARENG	35.17.04.2013	PULOSARI	2025	0801064902520002	SULIATI	2	07/10/1954	DSN SUMBERMULYO RT.05 RW.02	5	1	99	2	1
47	JAWA TIMUR	JOMBANG	BARENG	35.17.04.2013	PULOSARI	2025	3517054507550001	YULIATI	2	07/05/1955	DSN PULOSARI RT 08 RW 05	8	5	99	2	1



 KEPALA DESA PULOSARI

 NEFT UFUS SOLIKAH